

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Veno (2015), mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur *go public*. Yang menunjukkan bahwa terdapat satu hubungan yang berpengaruh signifikan terhadap nilai *Return on Equity (ROE)*. Hasil pertama dan keempat, *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh Dewan Direksi menunjukkan hasil berpengaruh signifikan, bahwa semakin tinggi Dewan Direksi maka cenderung meningkatkan nilai *Return on Equity (ROE)* yang menggunakan sampel 48 perusahaan *go public*. Hasil kedua dan ketiga, *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh Dewan Komisaris Independen menunjukkan hasil tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, bahwa semakin tinggi Dewan Komisaris Independen maka cenderung menurunkan nilai *Return on Equity (ROE)* yang menggunakan sampel 48 perusahaan *go public*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Pertiwi dan Pratama (2012), mengenai pengaruh kinerja, *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan *Food and Beverage*. Yang menunjukkan bahwa pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial interaksi antara kinerja keuangan dan *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka variabel *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial bukanlah variabel yang memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian ketiga Muchtar dan Darari (2015), yang mengenai *pengaruh corporate governance* terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa board structure tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang terdapat pada model 1 (ROA) akan tetapi, berpengaruh negatif pada model 2 (ROE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa board committee berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang terdapat pada model 1 dan model 2.

Penelitian keempat Darwis (2009), yang mengenai *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dan mekanisme GCG berpengaruh secara simultan terhadap kinerja perusahaan, nilai *adjusted R square* menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh variasi implementasi dan mekanisme GCG.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Pengertian dari Agency relationship yaitu sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (disebut sebagai pemegang saham atau pemilik suatu perusahaan) menunjuk orang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik suatu perusahaan. Pekerjaan tersebut termasuk pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut secara maksimal.

Bila kedua pihak memaksimalkan perannya (utility maximizers), cukup beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Teori keagenan merupakan hubungan antara pemilik perusahaan dan

manajemen, yang menunjuk manajemen untuk melakukan pekerjaan tersebut. Manajemen diberi tugas untuk mengelola suatu perusahaan atas nama pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan mengharapkan kepada manajemen untuk memaksimalkan tugas yang diberikan oleh pemilik perusahaan.

Hal ini sangat beralasan sekali sebab pada umumnya pemilik suatu perusahaan memiliki welfare motives yang bersifat jangka panjang, sedangkan manajemen lebih bersifat jangka pendek sehingga terkadang mereka lebih condong memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan mengabaikan sustainability keuntungan dalam jangka panjang. Untuk mengurangi masalah tersebut, pemilik mampu menetapkan motivasi yang sesuai dengan manajemen, yakni dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji. Dengan adanya monitoring cost tersebut manajemen akan senantiasa memaksimalkan kesejahteraan pemilik, walaupun keputusan manajemen dalam praktek akan berbeda dengan keinginan pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Pemilik perusahaan disini memiliki sifat jangka panjang sedangkan manajemen memiliki sifat jangka pendek dimana manajemen lebih memikirkan profit jangka pendek dan mengabaikan profit jangka panjang. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemilik harus mengeluarkan monitoring cost dalam bentuk gaji. Dalam bentuk monitoring cost, manajemen akan lebih memaksimalkan keamanan pemilik, meskipun tidak sesuai dengan kehendak pemilik perusahaan.

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan (Darmawati, dkk, 2005) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi. Yang pertama asumsi sifat manusia yang berhubungan dengan manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional dan tidak menyukai

resiko. Yang kedua asumsi keorganisasian yaitu berhubungan dengan adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi seperti kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara pemegang perusahaan dan manajemen. Yang ketiga asumsi informasi yaitu informasi yang dianggap sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan. Corporate governance menjadi efektivitas mekanisme yang bertujuan untuk meminimalisasi konflik keagenan dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah untuk dilakukan proses atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. *Corporate governance* yaitu salah elemen kunci dalam mengembangkan efisiensi ekonomis, yang terdiri dari serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholder lainnya. *Corporate governance* mampu memberikan stuktur yang memfasilitasi penentuan saran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004 dalam Oktapiyani 2009).

2.2.2 Good Corporate Governance

Corporate governance ialah proses yang bertujuan untuk meminimalisasi perselisihan keagenan, dengan penekanan khusus pada system legal yang mencegah dilakukannya proses atas pemegang saham minoritas (Jhonson dkk, 2010:102). Corporate governance digunakan sebagai pedoman bagi manajer untuk mengelola suatu perusahaan. Manajer dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi pemangku kepentingan. Sehingga berdampak bagi peningkatan nilai perusahaan karena saham perusahaan banyak diminati oleh investor.

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. Pengendalian internal dapat mencegah kerugian pengolahan sumber daya suatu perusahaan. Selain itu dapat juga menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan (Veno, 2015).

Pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* disuatu perusahaan yaitu berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Dimana suatu perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang sahamnya atau yang biasa disebut dengan pemilik suatu perusahaan, seringkali manajemen atau agen mengalami konflik dengan *stakeholder* (pemegang saham atau pemilik suatu perusahaan).

2.2.3 Kinerja Perusahaan

Kinerja merupakan ukuran keberhasilan suatu perusahaan apabila dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan (Barry Cusway, 2002). Penerapan GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangan serta mengurangi efek yang mungkin akan dilakukan oleh Dewan Direksi untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri, pada umumnya Corporate Governance mampu meningkatkan kepercayaan investor. Sedangkan

rendahnya pelaksanaan Corporate Governance dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor dan mampu menjadi faktor yang akan memperpanjang krisis ekonomi di Negara Indonesia. (Carningsih, 2009). Adapun proxy kinerja keuangan yang penulis gunakan adalah menggunakan Return on Equity (ROE). Alasan dipilihnya ROE sebagai proxy kinerja keuangan dikarenakan ROE memperlihatkan gambaran efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri yang berasal dari pemegang saham.

Pengukuran kinerja perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja non keuangan dan keuangan (*non financial performance measurement*) dan pengukuran kinerja pengukuran (*financial performance measurement*). Data yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu informasi keuangan (*financial information*). Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian terhadap kegiatan operasional agar dapat bersaing dengan perusahaan lain, serta untuk menetapkan prosedur yang benar dalam rangkai mencapai tujuan perusahaan.

(Rafiriny, 2012) mengklasifikasikan beberapa manfaat penilaian kinerja perusahaan, diantaranya adalah :

- a) Untuk mengukur prestasi yang dapat dicapai oleh suatu institut dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan.

- b) Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, pengukur kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
- c) Mampu digunakan menjadi dasar penentuan strategi suatu perusahaan untuk masa yang akan datang.
- d) Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan kegiatan organisasi dan devisi atau bagian organisasi lainnya.
- e) Sebagian dasar penentu kebijakan penanaman modal agar mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu perusahaan.

Dengan adanya pengukuran kinerja perusahaan maka perusahaan diharapkan mampu bertahan dan mengikuti persaingan dan perkembangan yang ada. Sistem pengukuran kinerja dalam penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan. Sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Arifani, 2013).

2.2.4 Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari penerapan kebijakan direksi. Hal ini dapat diharapkan untuk meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antar dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh sebab itu maka, dewan komisaris diharapkan dapat

mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham atau pemilik suatu perusahaan (Sulistiyowati, 2017).

Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memonitor kinerja seorang manajer. Surat keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor. Kep-315/BEJ/06-2000 mengharuskan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki dewan komisaris yang memonitor perusahaan agar tercipta *Good Corporate Governance* di Indonesia. Secara hukum dewan komisaris memiliki tugas dalam pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Dalam melakukan pemantauan terhadap direksi, dewan komisaris akan memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank (SKAI), auditor eksternal hasil pengawasan Bank Indonesia dan hasil pengawasan dari otoritas lain. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengawasi dipenuhi kepentingan semua stakeholder atau pemegang saham berdasarkan azas kesetaraan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi suatu Bank (Veno, 2015).

2.2.5 Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dan melaksanakan fungsi dan tugasnya. Komite audit mempunyai beberapa fungsi yaitu membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan,

meningkatkan efektifitas fungsi internal audit maupun eksternal audit dan mengidentifikasi hal yang perlu diperhatikan dewan komisaris (Sulistyowati,2017).

Komite audit ialah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan suatu perusahaan. Beberapa tanggung jawab Komite audit yang perlu di perhatikan yaitu untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit external, dan mengamati system pengendalian internal. Komite audit juga bertanggung jawab kepada dewan komisaris independen, dengan seperti itu fungsi dan tanggung jawab komite audit dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal ini akan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip *good corporate governance* yang akan mendorong perusahaan untuk selalu bertanggung jawab kepada kepentingan seluruh *stakeholder* atau pemegang saham (Sulistyowati, 2017).

2.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam perusahaan dalam pelaksanaan *good corporate governance* karena dianggap memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.

Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013), kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pihak institusi yaitu perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta. Lembaga institusi memiliki proporsi kepemilikan yang cukup besar terhadap perusahaan. Dengan adanya investor institusional kinerja manajemen serta keputusan-keputusan yang

diambil oleh manajemen dapat dimonitor atau diawasi. Menurut Haryono (2005), pada umumnya pemegang saham institusional memiliki proporsi kepemilikan yang tinggi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio perbandingan antara jumlah lembar saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar.

Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013), kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pihak institusi yaitu perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta. Lembaga institusi memiliki proporsi kepemilikan yang cukup besar terhadap perusahaan. Dengan adanya investor institusional kinerja manajemen serta keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen dapat dimonitor atau diawasi. Menurut Haryono (2005), pada umumnya pemegang saham institusional memiliki proporsi kepemilikan yang tinggi. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio perbandingan antara jumlah lembar saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Dengan semakin besarnya komposisi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka diharapkan tingkat independensi dalam pengendalian terhadap manajemen semakin objektif. Menurut Noviawan dan Septiani (2013) semakin besar proporsi dewan komisaris independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan lebih baik.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Khan dan Awan (2012) yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H1: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3.2 Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang tugasnya adalah membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas laporan keuangan serta implementasi dari GCG. Karena tugas komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris maka dengan semakin banyaknya anggota komite audit, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan diharapkan dapat meminimalisir upaya manajemen untuk memanipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan semakin meningkat.

Hal ini didukung oleh Siallagan dan Machfoedz dalam Ekowati Dyah Lestari (2011) yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Fidiana (2017) mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H2: Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

2.3.3 Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam perusahaan dalam pelaksanaan *good corporate governance* karena dianggap memiliki arti penting

dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.

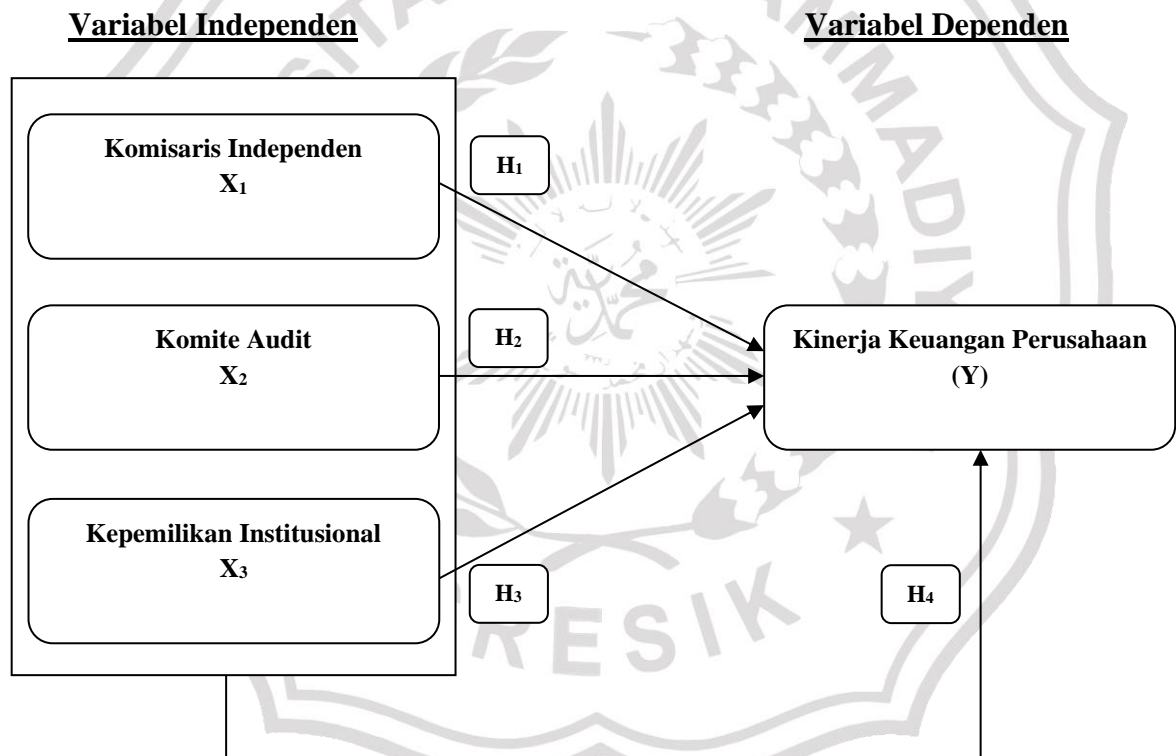
Menurut Jensen dan Meckling (1976), terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional dapat meminimalisasi adanya konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Dengan adanya pengawasan dari institusional dapat mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen untuk menghindari adanya perilaku penyelewengan yang dilakukan manajemen. Sehingga dengan adanya keterlibatan institusi dengan perusahaan dapat berpengaruh untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Namun, terdapat juga penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Hal ini dinyatakan oleh Sujoko dan Soebiantoro (2017) bahwa pihak pemegang saham institusi akan bekerja sama mendukung pihak manajemen dalam pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan pribadi dan akan mengabaikan kepentingan dari pemegang saham minoritas. Adanya hubungan negatif ini juga dikemukakan oleh Susanti dan Mildawati (2014), dimana pihak institusi hanya berorientasi pada perusahaan yang sedang laba. Dan dapat secara sewaktu waktu menarik kepemilikan saham terhadap perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan secara drastis terhadap harga saham perusahaan. Selain itu, banyak juga perusahaan yang menemukan hasil pengaruh tidak signifikan antara kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. seperti oleh Nuraina (2002) dan Xavier et al (2015). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting dan menggunakan Analisis regresi liner berganda. Adapun masalah penting dalam penelitian ini yakni komisariss independen, komite audit, kepemilikan institusional yang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian perumusan hipotesis di atas, maka dapat ditampilkan kerangka konseptual gambar 2.1 sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Konse/ptual

Berdasarkan pada gambar di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, Variabel dependen dalam penelitian

ini adalah kinerja keuangan yang di simpulkan dengan (Y), Variabel independen dalam penelitian ini adalah komisariss independen, komite audit, kepemilikan institusional, yang disimpulkan dengan (X1), (X2) dan (X3). Teknik analisis data yang digunakan adalah regrensi linier berganda. Bahwa variabel Komisariss Independen (X1) , Komite Audit (X2) , Kepemilikan Institusional (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

